

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini dipaparkan literatur terkait penelitian pengembangan ekonomi lokal, peranan, kebijakan program yang diterapkan oleh Swisscontact mengenai dampak dari program tersebut.

2.1 Pengembangan kawasan Perdesaan dalam Pengembangan Wilayah

Terdapat program-program terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di perdesaan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan melalui peningkatan akses dan pemeratan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau di kawasan perdesaan. Meningkatkan relevansi antara pendidikan dan pasar tenaga kerja melalui pendidikan ketensi dan karakter di tingkat lokal. Memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung pembangunan perdesaan menurut Dr. Lutfi Muata'ali, S.Si.MSP meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas dan terjangkau untuk daerah perdesaan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak.
2. Perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara di perdesaan, peningkatan pendidikan kecakapan hidup termasuk kecakapan vokasional yang sesuai potensi dan karakter di tingkat lokal

3. Peningkatan pendidikan non-formal untuk meningkatkan keterampilan kerja
4. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi penduduk kperdesaan
5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi penduduk perdesaan
6. Promosi pola hidup sehat dan perbaikan gizi masyarakat dan
7. Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan repdoduksi dikawasan perdesaan.

Sesuai dengan UU Desa Nomor 5 tahun 2016 bahwa pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor pasar dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Arahkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau badan usaha milik desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) pembangunan kawasan perdesaan yang

berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 4 ayat (2) mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) merupakan dasar dari UU Nomor 6 Tahun 2014 kemudian dari UU Nomor 26 tahun 2207 tentang penataan ruang dilanjutkan sasaran prioritas nasional dalam RPJMN dimana tertuang pengurangan 5000 desa tertinggal dan penambahan 2000 desa mandiri serta pembangunan 40 kawasan perdesaan selanjutnya di lanjutkan kebijakan dari Presiden Jokowi yaitu NAWACITA ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daeah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Berikut ini merupakan dokumen rincian pembangunan kawasan perdesaan yang tertuang pada rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan

Tabel 2.1 Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

NO	Program/Kegiatan
A.	Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Klsater
1	Membangun Klaster
	Sosialisasi klaster kepada stakeholder terkait
	Mengidentifikasi berbagai produk unggulan klaster
	Melakukan survey ke lapangan untuk kepentingan validasi
	Evaluasi untuk menentukan kelayakan produk unggulan
	Menetapkan produk unggulan klaster
	Membentuk manajemen klaster
	Menyusun AD/ART klaster
	Menyusun rencana bisnis
	Pelaksanaan pembinaan klaster
	Penguatan POKTAN, POKDARWIS dll

NO	Program/Kegiatan
B.	Program Peningkatan Kapasitas SDM
1	Peningkatan Kapasitas Petani/nelayan dan pengolah komoditi unggulan
	Pelatihan Budidaya komoditi unggulan yang Baik (Good Agricultural Practices)
	Pelatihan Pasca Panen
	Pelatihan Budidaya komoditi unggulan yang baik organik
	Pelatihan Pengolahan komoditi unggulan
	Pelatihan packaging
	Pelatihan pembuatan product branding
	Pelatihan klaster/OVOP/ OTOP
	Pelatihan penggunaan internet untuk pemasaran
2	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah dan Stakeholder lainnya
	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Daerah
	Pelatihan Klaster/OVOP/ OTOP
	Pelatihan product branding dan region branding
3	Peningkatan Kapasitas Manajemen Klaster, Poktan, Pokdarwis
	Pelatihan untuk manajemen klaster dan forum rembug klaster
	fPelatihan manajemen POKTAN/ POKDAKAN/POKDARWIS
	Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran dl
4	Fasilitasi untuk Petani, Klaster dan Pemda oleh TA
	Fasilitasi dan pendampingan untuk PEMDA dari TA PED nasional
	Fasilitasi untuk masyarakat dan Klaster
C.	Program Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
1	Pembangunan dan Pebaikan Infrastruktur
	Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan dari dan ke kawasan
	Pembangunan embung/long storage
	Pembangunan jaringan irigasi
	Pembangunan pembangkit/gardu listrik
	Pembangunan Pasar Desa/Kawasan
	Pembangunan TPS/TPA
	Bantuan sarana dan prasarana internet
	Pembangunan BLK
	Pembangunan SMK
2	Bantuan Alat Sarana
	Bantuan alar sarana produksi
	Bantuan alat pengolahan
D.	Program Peningkatan Kerjasama antara Pemda, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan Stakeholder Lainnya
1	Kemitraan dengan Kementerian Lembaga/Pemda Kabupaten/Kota
2	Kemitraan dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian
3	Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Media Masa

NO	Program/Kegiatan
E.	Program Pengembangan Product Branding dan Region Branding
1	Pengembangan Product Branding
	Sosialisasi kepada stakeholder terkait
	Rapat/FGD penentuan product branding bersama
	Penetapan product branding bersama
2	Pengembangan Region Branding
	Mengkaji citra kiwari
	Membentuk POKJA
	Identifikasi daya saing
	Identifikasi kelompok sasaran
	Menentukan pesan inti
	Mengkaji kesiapan
	Mengukur kemajuan
	Launching region branding
	Pemeliharaan region branding
	Monitoring dan evaluasi region branding

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam menu rencana aksi dokumen RPKP tertuang bahwa dalam menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan terdapat program-program atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan. Bentuk program yang dilaksanakan yaitu pelatihan dalam bidang-bidang yang memiliki sektor-sektor potensial dalam pengembangan di perdesaan yaitu pertanian, perikanan, peternakan dan lembaga-lembaga berupa kelompok tani (poktan), pengiat wisata (podarwis) dan sebagainya. Ternyata peran *stakeholder* lainnya mempunyai pengaruh guna membantu pembangunan kawasan perdesaan yaitu pentingnya kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah hal ini mengupayakan terjalinnya kerjasama guna terlaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pada penelitian ini merupakan upaya dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan dengan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yaitu salah satu *stakeholder* non-profit kerjasama dengan pemerintah kabupaten pesawaran untuk melaksanakan program berbasis pelatihan terhadap petani-petani kakao untuk

mewujudkan produksi kakao yang berkelanjutan. Hal ini sangat sesuai dengan dokumen peyusunan pembangunan kawasan perdesaan yang diterbitkan oleh kementerian desa.

2.2 Pengembangan Ekonomi dalam Pengembangan Perdesaan

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat (Arsiyah, 2002). Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2004 sampai 2009 yang dituangkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu menciptakan Indonesia yang aman damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2.3 Konsep Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia, baik pembangunan ekonomi nasional, daerah, maupun pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, SDM juga merupakan kunci keunggulan kompetitif suatu bangsa, dimana keunggulan tersebut hanya dapat dicapai jika sumber daya manusia memiliki kualitas maupun kuantitas yang memadai (Wirawan, 2015). Berdasarkan hal tersebut, SDM dapat dikatakan sebagai elemen yang sangat penting untuk dikembangkan secara optimal guna mempersiapkan Indonesia memasuki era globalisasi dan liberalisasi investasi, serta perdagangan dunia mendatang (Tjiptoherijanto, 1999). Namun, untuk mencapai pengembangan sumber daya manusia yang optimal, perlu diawali oleh proses perbandingan antara kapasitas yang dimiliki saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan, melalui identifikasi potensi maupun masalah terkait kapasitas sumber daya manusia yang ada saat ini agar pengembangan SDM yang dilakukan dapat sesuai kebutuhan serta mampu menyelesaikan duduk permasalahan secara efektif dan efisien.

Secara umum, kapasitas merupakan seperangkat modal yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pengembangan, salah satunya pengembangan sumber daya manusia. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai perpaduan atau kombinasi antara sikap, sumber daya, strategi, serta keterampilan yang dapat digunakan seorang individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan atau nilai tertentu. Sedangkan menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam (Mirzoev, 2018) kapasitas ialah suatu kemampuan individu, organisasi, maupun masyarakat untuk melaksanakan peran, menyelesaikan masalah, serta mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sederhananya, kapasitas ialah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Konsep kapasitas sendiri erat kaitannya dengan konsep kemampuan serta kemauan individu dalam menjalani suatu pekerjaan, dimana kapasitas terbentuk dari adanya keterampilan, sikap, pemahaman, serta motivasi individu yang juga merupakan komponen-komponen

utama dari kemampuan dan kemauan sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan.

2.4 Program Swisscontact dalam Pengembangan SDM Pertanian

Pelatihan sekolah lapangan yang dilakukan oleh pihak Swisscontact dalam melaksanakan program produksi kakao berkelanjutan dibekali dengan adanya kurikulum dan panduan modul yang efektif untuk meningkatkan kapasitas petani binaannya. Dalam kurikulum dan modul pelatihan sekolah lapangan prosesnya yaitu fasilitator diarahkan untuk menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, sehingga atmosfir belajar yang tercipta adalah terjadinya saling berbagi (*sharing*) pengalaman diantara warga belajar, termasuk fasilitator. Pendekatan partisipatif dan media belajar inilah yang membedakan modul ini dengan sekolah lapangan pada umumnya.

Modul ini ditulis dan dikembangkan sebagai fasilitas dalam melaksanakan sekolah lapangan tanaman kakao. Modul ini memberikan kerangka dasar dan materi pengajaran untuk proses tersebut. Perlu dipahami bahwa ada beberapa modul baru yang ditulis berdasarkan kebutuhan di lapangan dan ada juga modul yang diadaptasi dari berbagai modul sebelumnya, yaitu antara lain:

1. Penerapan budidaya terbaik tanaman kakao
2. Panduan fasilitator lapangan dalam penyelenggaraan sekolah lapangan
3. Modul sekolah lapangan, pengalaman dari Kalimantan Barat
4. Pembelajaran orang dewasa
5. Teknik fasilitasi dasar.

Modul sekolah lapangan sudah lama dikembangkan. Modul baru ini disusun dengan modifikasi sesuai kondisi saat ini. Oleh karena itu, sebelum menggunakan modul ini, fasilitator yang akan memfasilitasi sekolah lapangan harus mendapatkan *Training of Trainers* (ToT) dan teknik fasilitasi dasar terlebih dahulu, khususnya untuk memahami metodologi penyampaian modul dan teknis budidaya tanaman

kakao. Selain itu, ToT bertujuan agar fasilitator memahami prinsip pendekatan partisipatif dalam Sekolah lapangan, memahami metodologi penyampaian modul dan bagaimana menggunakan modul ini. Modul ini berisi kurikulum dan panduan Sekolah lapangan, yang merupakan perpaduan teknik fasilitasi partisipatif dan penerapan praktik-praktik pertanian terbaik (*Good Agricultural Practices*). Modul ini terdiri atas 3 (tiga) komponen besar yaitu:

1. Modul 1: Persiapan dan Evaluasi Sekolah lapangan Tanaman Kakao (*Good Agricultural Practices* (GAP)
2. Modul 2: Dasar praktik Budidaya Tanaman Kakao (*Good Agricultural Practices* (GAP) - *Basic Practices*)
3. Modul 3: Modul Lanjutan Praktik Budidaya Tanaman Kakao (*Good Agricultural Practices* (GAP) *for Advanced Farmers*)

Pada penelitian ini hanya akan membahas mengenai modul 2 mengenai dasar praktik budidaya tanaman kakao (*Good Agricultural Practices* (GAP) - *Basic Practices*). Karena lanjutan modul berikutnya materinya tidak sampai penuh disampaikan di beberapa titik wilayah binaan program tersebut. Inti dari kurikulum pelatihan ini merupakan upaya untuk melatih setiap kader petani yang ikut program semakin mendalami dan memahami bahkan menerapkan metode yang dipelajari dalam mendukung kapasitas sumber daya petani kakao guna mencapai produksi kakao berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pihak Swisscontact.

Pelatihan yang dilakukan memiliki jenjang waktu dan materi pembelajaran yang diajarkan tiap-tiap wilayah binaan kader petani. Materi yang diajarkan semua tertuang dalam modul pelatihan praktik kakao yang baik. Metode pelatihannya dibuat adanya pemaparan yang dilakukan pihak fasilitator dan tanya jawab serta diskusi dan praktik langsung di kebun kakao. Berikut ini merupakan bahan materi yang jadwal pelaksanaan pelatihan dasar praktik budidaya tanaman Kakao (*Good Agricultural Practices* (GAP) - *Basic Practices*) guna mencapai produksi kakao berkelanjutan.

Ada beberapa hal dalam penggunaan modul dasar praktik budidaya tanaman kakao ini antara lain:

1. Modul ini dibuat dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan menggunakan metode Sekolah lapangan yang dilaksanakan di kebun kakao.
2. Setiap modul berisi topik-topik khusus yang berkaitan dengan GAP tanaman kakao yang diintegrasikan dengan teknik peningkatan kapasitas dari para petani, sehingga petani dapat memperoleh informasi yang akurat dan berguna dalam mengambil keputusan untuk kebun mereka.
3. Prinsip dari proses belajar dalam sekolah lapangan adalah melakukan proses belajar di lapangan dengan konsep *agro-ekosistem*; observasi dan analisis; pendidikan orang dewasa dan *learning by doing*. Proses belajar ini harus mengedepankan prinsip *learning by doing*, yaitu memberi kesempatan bagi petani untuk belajar melalui praktik langsung. Dengan demikian, teori dan pengalaman yang diberikan dalam sekolah lapangan dipadukan dengan praktik. Petani juga dibimbing untuk melakukan proses refleksi diri dan melakukan inovasi melalui kebebasan untuk berkreasi dalam setiap topik dan kegiatan.
4. Inovasi teknologi yang diberikan sebaiknya juga selaras dengan kearifan lokal (teknologi yang sudah ada di tingkat petani dan terbukti sesuai kondisi setempat).
5. Jika untuk topik tertentu dirasakan perlu narasumber dari pihak lain, sebaiknya melibatkan tenaga ahli di bidangnya.
6. Kurikulum Sekolah lapangan dapat dilihat dan dipelajari pada bagian lain dari modul ini.

Berikut ini kurikulum dan materi pelatihan yang dilakukan oleh pihak *swisscontact* dalam melakukan pelatihan sekolah lapang di Kecamatan Gedong Tataan di lima desa yaitu Cipadang, Wiyono, Kebagusan, Sukadadi dan Taman Sari.

Tabel 2.2 Materi Modul Dasar Praktik Budidaya Tanaman Kakao (Good Agricultural Practices)

Minggu	Kegiatan
Minggu 0	Survey dan Persiapan Sekolah lapangan
Minggu ke-1	Pre Test
	Penentuan Demo Plot dan Penentuan Sampel
	Pengenalan AESA
Minggu ke-2	Mengenal Tanaman Kakao
Minggu ke-3	Mengenal tanah, Kerusakan Tanah dan Konversi Tanah
	Sub Bahasan : Mengenal Tanah
	Sub Bahasan : Kerusakan Tanah dan Konversi Tanah
Minggu ke-4	Nustri Tanaman 1
	Sub Bahasan : Mengenal Nutrisi Tanaman Bagi Tanaman Kakao (Anorganik dan Organik)
	Sub Bahasan : Mengenal Jenis dan Fungsi Pupuk Organik
Minggu ke-5	Nustri Tanaman 2
	Sub Bahasan : Pembuatan dan Pengelolaan Pupuk Organik
	Sub Bahasan : Pemberian Nutrisi pada Tanaman Kakao
Minggu Ke-6	Musuh Alami, Gulma pada tanaman Kakao
Minggu Ke-7	Mengenal Penyakit Utama pada tanaman kakao
Minggu Ke-8	Mengenal pestisida kimiawi dan Nabati
	Sub Bahasan : Mengenal Pestisida Kimiawi
	Sub Bahasan : Mengenal dan Membuat Pestisida Nabati
Minggu Ke-9	Pemeliharaan Kebun Kakao 2
	Sub Bahasan : Pemeliharaan Tanamann Kakao
	Sub Bahasan : Pemangkasan Tanamann Kakao
Minggu Ke-10	Pemeliharaan Kebun Kakao 2
	Sub Bahasan : Panen Sering dan Sanitasi Kebun
	Sub Bahasan : Pengelolaan Tanaman Pelindung
Minggu Ke-11	Rehabilitasi Tanaman kakao dan Pemeliharaannya
	Sub Bahasan : Rehabilitasi Tanaman Kakao (sambung pucuk, sambung samping

Sumber: *Swisscontact*, 2016

Selain kegiatan pelatihan yang dilakukan pihak Swisscontact juga memberikan bantuan pengadaan berupa alat-alat dalam pemeliraan kakao seperti guntung, pupuk, bibit dan bahan-bahan lainnya. Pengadaan alat-alat ini merupakan upaya untuk membantu para petani yang disalurkan setiap kelompok-kelompok petani yang mengikuti program, pembagian alat-alat ini tidak dikenakan biaya oleh pihak penyelenggara program yaitu Swisscontact, untuk mendapatkan itu semua yaitu wajib mengikuti program pelatihan sekolah lapangan yang sudah terdaftar.

